

## Mensesneg: Tolak Revisi UU Pemilu dan Pilkada Bukan untuk Halangi Anies

JAKARTA (IM) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa penolakan pemerintah terhadap revisi UU Pemilu dan UU Pilkada bertujuan untuk menghalangi langkah politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia menegaskan bahwa sikap pemerintah ini sama sekali tak berkaitan dengan Anies.

"Nggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," kata Pratikno melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2).

Pratikno mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dibentuk pada 2016 lalu. Kala itu, Anies masih duduk di kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam UU Pilkada diamanatkan bahwa

Pilkada digelar secara serentak di seluruh daerah pada tahun 2024 bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Menurut Pratikno, aturan itu dibuat tanpa maksud menghambat langkah politik pihak tertentu.

"Justru jangan dibalik-balik juga, jangan UU mau diubah untuk tujuan tertentu," ujarnya.

Pratikno juga menyebut bahwa sikap pemerintah terhadap UU Pemilu dan Pilkada tak berkaitan dengan rencana politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Saat UU Pilkada dibuat, Gibran tengah mengembangkan bisnisnya dan belum punya rencana terjun ke politik. "Mungkin nggak kebayang juga kan maju Wali Kota pada waktu itu," kata Pratikno. ● han

## Usai Dilantik, Gubernur Kalimantan Utara Didampingi Jajarannya Mengunjungi KPK

JAKARTA (IM) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang didampingi jajarannya yakni Asisten 1 Pemprov Kaltara DT Iqro Ramadhan dan 2 orang staf khusus, mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (16/2).

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, kedatangan Gubernur Kaltara diterima tiga Ketua KPK Firdi Bahuri dan dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

"Kehadiran Gubernur Kalimantan Utara untuk melakukan audiensi dengan KPK terkait agenda masa tugasnya setelah dilantik sebagai Gubernur Kaltara periode 2021-2024, Senin (15/2), di Istana pasca terpilih dalam Pilkada Serentak 2020," kata Ipi dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2).

Ipi mengatakan, dalam kesempatan tersebut Pimpinan KPK mengingatkan Gubernur Kaltara agar memenuhi janji kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. I

a menyebut, pemerintahan yang baik sekurang-kurangnya meliputi empat hal. Yakni pembangunan aparatur pemerintahan yang baik, kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan komitmen antikorupsi yang diwujudkan dalam program-program pembangunan di Kaltara.

"KPK juga mengingatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap memegang teguh integritas, tertib admin-

istrasi, dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," ucap Ipi.

Pesan tersebut, menurut Ipi, perlu disampaikan mengingat kepala daerah menghadapi tantangan yang lebih berat di masa pandemi untuk memastikan program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Saat bertemu pimpinan KPKJ, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan harapannya agar KPK dapat melakukan pendampingan untuk mengawal program pembangunan yang akan dijalkannya di Provinsi Kaltara.

Zainal juga menyampaikan keinginannya untuk mengembangkan potensi alam khususnya sumber daya laut yang dinilai cukup menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara namun belum dikelola dengan baik.

"KPK menyambut baik rencana tersebut. Harapannya, sumber daya alam Kaltara akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kaltara," ucap Ipi.

Berdasarkan catatan KPK, area intervensi optimalisasi PAD pada Monitoring Control for Prevention (MCP) 2020 adalah yang terendah dan masih harus ditingkatkan dengan skor 49 persen.

"Meski secara umum skor total MCP 2020 Provinsi Kaltara sudah cukup baik yaitu 84 persen. Nilai ini di atas rata-rata nasional yaitu 64 persen," kata Ipi. ● mei



### WAKSIN COVID-19 SIAP DIPAKAI

Konferensi pers Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, Selasa (16/2). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K Lukito mengatakan antivirus buatan Bio Farma bernama Vaksin Covid-19 siap dipakai untuk imunisasi masyarakat setelah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM.

## Gunung Sinabung Luncurkan Guguran Awan Panas Sejauh 2 Km

KARO (IM) - Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali erupsi dengan meluncurkan guguran awan panas sejauh 2 kilometer (km), Selasa (16/2).

Kepala Pos Pengamatan Gunung Sinabung, Armen Putra mengatakan, selain memuntahkan guguran awan panas, Gunung Sinabung terpantau mengeluarkan asap kawah berwarna putih intensitas sedang dengan tinggi kolom, 200 meter. Guguran awan panas ini tercatat dengan amplitudo 120 mm dengan durasi gempa selama 270 detik.

"Cuaca cerah dan bewan dan angin bertiup lemah hingga sedang ke arah tenggara dan selatan. Suhu udara 19-26 derajat Celsius," ujar Armen Putra.

Saat ini Gunung Sinabung yang ketinggiannya mencapai 2.460 me-

ter di atas permukaan laut (mdpl) berada pada status Level III (Siaga). Warga maupun petani direkomendasikan agar tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi serta di lokasi di dalam radius 3 km dari puncak gunung.

Selanjutnya radius sektoral 5 km untuk sektor selatan-timur, dan 4 km untuk sektor timur-utara.

Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila ke luar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik.

Selain itu, mengamanakan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanis yang lebat agar tidak roboh. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhalu di Gunung Sinabung juga diminta agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## Bubarkan Cyber Army Istana yang Bikin Rakyat Takut Sampaiakan Kritik

Selain revisi UU ITE dan membubarkan cyber army istana, anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta Jokowi agar memerintahkan Polri untuk tidak menangkap para pengkritik.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan pasukan siber atau cyber army istana karena dinilai telah membuat rakyat

takut menyampaikan pendapat dan kritik.

"Bubarkan cyber army istana yang bikin rakyat takut menyampaikan pendapat dan mengkritik. Apakah bisa? Sangat bisa jika ada kemauan,"

kata Benny, Selasa (16/2).

Hal itu disampaikan Benny saat diminta tanggapan soal pernyataan Jokowi yang mewacanakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Benny mengatakan, Partai Demokrat mendukung revisi UU ITE karena UU tersebut rawan digunakan penguasa untuk membungkam para pengkritik.

Menurutnya, saat ini rakyat takut mengkritik kebijakan pemerintah karena khawatir ditangkap dengan dasar UU ITE. Anggota Komisi III

DPR itu pun menilai Jokowi memiliki kekuatan yang cukup untuk merevisi UU ITE karena mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah.

"Jika serius, Presiden berhak bahkan menentukan revisi ini terjadi, apalagi dia punya 7 Parpol pendukung di DPR. Jadi, jika serius dan satunya perkataan dan perbuatan maka silahkan wujudkan segera," ujar Benny.

Selain revisi UU ITE dan membubarkan cyber army istana, Benny juga meminta Jokowi agar memerintahkan Polri untuk tidak menangkap para pengkritik.

"Harus selektif, jangan tegakkan hukum karena ingin

bapak senang," katanya.

Juru Bicara Presiden Fadjiroel Rachman sebelumnya menyatakan, pemerintah tidak memiliki buzzer atau pendengung untuk membela kebijakan pemerintah. Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik peme-gang kuasa.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjiroel, Rabu (10/2) lalu.

Fadjiroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis di mana setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan. ● mei

## Menteri PAN RB Usulkan Libur Idul Fitri Diperpendek

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjoko Kumolo mengusulkan libur Idul Fitri hingga Tahun Baru diperpendek. Hal tersebut disampaikan Tjahjoko di acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di lingkungan Polri Tahun 2020 secara virtual, Selasa (16/2).

"Kami mengusulkan supaya libur Idul Fitri, libur Tahun

Baru tidak ada H-5, H+5 atau H-10 atau H+10, diperpendek dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin serta sanksi tegas," kata Tjahjoko.

Menteri yang berasal dari PDIP ini mengatakan, hal tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk aparaturnya sipil negara (ASN) maupun TNI/Polri. Usulan tersebut disampaikan Tjahjoko untuk menekan kasus Covid-19. Apalagi belakangan kasus

Covid-19 di Tanah Air mulai menunjukkan penurunan meski tak signifikan.

Merujuk data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 penurunan kasus Covid-19 mencapai 25 persen. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan cuti bersama lebaran 2021 pada September 2020 lalu. Libur atau cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2021 ditetapkan pada 12 Mei dan 17-19 Mei 2021. ● mei

## Khawatir Muncul Mafia Tanah, Anggota DPR Minta KPK Dilibatkan Kebijakan e-Sertifikat

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardy Gaus meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta lembaga penegak hukum di Indonesia, dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat tanah elektronik atau e-Sertifikat.

"Pelaksanaan e-Sertifikat ini harus bisa memberikan dampak baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Guspardy dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (16/2).

Menurut Guspardy, peran serta KPK dan lembaga-lembaga hukum lainnya penting untuk menciptakan rasa aman dan meminimalisir kasus perantaraan yang selama ini masih terjadi. "KPK dan lembaga hukum harus dilibatkan untuk memberangus praktik mafia tanah yang masih mengancam," lanjutnya.

Di samping itu, kata Guspardy, kebijakan e-Sertifikat

yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu sebaiknya tidak membuang sertifikat fisik.

"Sertifikat elektronik ini baiknya dijadikan back up atau dokumen cadangan untuk menguatkan sertifikat fisik sebagai bukti kepemilikan yang sah," usulnya.

Proses digitalisasi sertifikat tanah perlu dilakukan dengan double security atau triple security. Salah satu caranya adalah menggunakan barcode atau password yang bisa ditambahkan teknologi biometrik. Teknologi biometrik itu, jelas Guspardy, bisa berupa sidik jari, retina mata, wajah, atau identifikasi irama suara.

Adanya teknologi ini berguna meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam proses autentikasi dan validasi e-Sertifikat.

Guspardi Gaus mengatakan, jika sistem tersebut berhasil diterapkan dalam e-Sertifikat, pindah tangan secara

ilegal dapat dihindari.

"Tentunya dapat meminimalisir risiko sengketa tanah lain, seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan tanah, sertifikat ganda, beserta sederet masalah pertanahan lain," paparnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, masalah mafia tanah menjadi salah satu momok yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Program berlapis tersebut, kata Guspardy, menjadi salah satu bentuk solusi untuk menghalau munculnya potensi penyelewengan tanah yang sering terjadi.

Selain itu, Guspardy menuturkan, BPN memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi jaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen sertifikat.

"BPN harus bisa menjamin keamanan dan kerahasiaan data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah masyarakat," katanya. ● han



### PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19

Menkumham Yasonna Laoly saat meresmikan kantor Balai Pendidikan dan Latihan Hukum dan HAM (Badiklatkumham) Jawa Tengah di Semarang, Selasa (16/2). Menkumham Yasonna Laoly menyebut keberhasilan program pengendalian pandemi Covid-19 di lingkungan lembaga masyarakat dan rumah tahanan di Indonesia mendapat apresiasi dari dunia internasional.

## Panglima TNI: Hindari Pelanggaran HAM

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan para prajuritnya agar menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, menghindari pelanggaran HAM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam Rapim TNI kita juga harus melihat untuk menghindari tindakan pelanggaran HAM, sebagaimana itu perintah dari Presiden," kata Hadi saat memberikan amanat saat Rapim TNI 2021 di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (16/2).

Hadi menjelaskan, pelanggaran HAM hanya akan menjatuhkan nama baik TNI sendiri. Selain itu, bilamana terjadi pelanggaran HAM, maka masyarakat akan jauh dari TNI serta musuh yang dihadapi akan semakin kuat.

"Karena pelanggaran

HAM hanya akan menjatuhkan TNI dari rakyat dan menjauhkan TNI dari rakyat serta membuat musuh semakin kuat," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Panglima menitipkan pesan agar pemahaman ihwal HAM haruslah disosialisasikan. Sosialisasi tersebut, sambungnya, harus sampai di tingkat yang paling bawah.

"Dia (prajurit) boleh berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Kita menghadapi permasalahan serius di lapangan," tuturnya.

Hadi juga meminta agar

keunggulan yang dimiliki TNI harus terus ditingkatkan. Sementara untuk kelemahan yang ada, Hadi meminta untuk bisa dinetralkan.

"Termasuk kelemahan dr sisi kondisi dan spesifikasi alutsista. Latihan, penyiapan operasi bagi personel dan satuan, baik operasi dalam maupun luar negeri," katanya. ● han

## Gus Yaqut dan Said Aqil Tak Hadir, Pengacara Gus Nur Kembali Walkout

JAKARTA (IM) - Tim pengacara Sugi Nur Raharja atau Gus Nur kembali walkout karena kliennya tak kunjung dihadirkan secara langsung, di persidangan. Sidang lanjutan kasus ujaran kebencian yang didakwakan kepada Gus Nur dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari JPU, di gelar di PN Jakarta Selatan, Selasa (16/2) Berdasarkan pantauan,

kuasa hukum Gus Nur walkout sebelum majelis hakim menutup jalannya persidangan kali ini. Pasalnya, kliennya itu tak lagi dihadirkan secara langsung di persidangan dan penangguhan terhadap Gus Nur tak kunjung direspons hakim.

Ditambah lagi, pada persidangan kali ini, saksi yang rencananya dihadirkan oleh Jaksa, yakni Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj kembali tak hadir.

Alhasil, Ketua Majelis Hakim, Toto Ridarto pun menunda persidangan tersebut pada Selasa, 23 Februari 2021 mendatang.

"Saksi belum bisa hadir, Yang Mulia," kata JPU di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa (16/2).

Sementara itu, kuasa hukum Gus Nur, Ricky Fatamazaya mengatakan, sejetinya sejak awal persidangan hingga saat ini, pihaknya selalu mengajukan ke hakim untuk menanggulangi penahanan dan menghadirkan Gus Nur secara langsung di persidangan. Namun, hingga saat ini semua permohonan itu

tak direspons hakim dan jaksa.

"Tadi saya masuk mewakili (semua tim pengacara Gus Nur) mengonfirmasi apakah terdakwa hadir langsung atau tidak. Karena terdakwa tidak hadir, maka sesuai keputusan kami, kami keluar dari persidangan," tuturnya.

Menurutnya, tim pengacara melakukan walkout karena permohonannya tak kunjung direspons hakim. Penangguhan penahanan terhadap Gus Nur itu diajukan agar kliennya tak mengalami nasib serupa sebagaimana Ustadz Maaher.

"Poin kedua, setidaknya majelis memerintahkan JPU menghadirkan terdakwa. Faktanya, terdakwa juga belum hadir disini sehingga terdakwa menyampaikan seolah-olah kita mengemis hukum, padahal ini hak klien kami, hak kami untuk meminta itu," terangnya.

Tidak hanya tak menghadirkan Gus Nur, paparnya, Jaksa pun kembali tak menghadirkan dua saksinya, yakni Gus Yaqut dan Said Aqil. Alhasil, pengacara pun mempertanyakan untuk apa persidangan digelar bila saksi dan terdakwa tak kunjung dihadirkan pula. "Lalu untuk apa sidang ini dilakukan? Kebenaran materi apa yang kita dapatkan? Mesti dipahami majelis disini seolah Jaksa tak menghormati adanya majelis, seolah sidang ini formalitas saja karena para pihaknya tidak hadir. Kami tekankan agar ke depan majelis memberikan kesempatan terdakwa untuk hadir," katanya. ● han